

## **BREXIT DAN UPAYA ANTISIPASI INDONESIA**

7

Lisbet

### Abstrak

*Pada tanggal 29 Maret 2019 Inggris seharusnya sudah keluar dari Uni Eropa (British Exit/Brexit). Tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan Brexit, dampaknya, serta bagaimana upaya Indonesia untuk mengantisipasi hal tersebut. Dampak Brexit antara lain penurunan indeks saham gabungan di hampir seluruh negara; pelemahan nilai tukar mata uang Euro dan Poundsterling terhadap US Dollar, serta adanya penurunan yang cukup drastis terhadap jumlah investasi Inggris ke Indonesia. Sebagai upaya antisipasi Brexit, Indonesia telah melakukan Penandatanganan Forest Law Enforcement, Governance and Trade and Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) dengan Inggris pada tanggal 29 Maret 2019 di Jakarta. DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi lainnya berdasarkan jenis-jenis komoditas produk unggulan Indonesia yang diekspor ke Inggris.*

### **Pendahuluan**

Berdasarkan Traktat Lisabon Pasal 50, Inggris seharusnya telah keluar dari Uni Eropa (*British Exit/Brexit*) pada tanggal 29 Maret 2019. Langkah ini seharusnya dilakukan setelah proses panjang yang dialami Inggris sejak diselenggarakannya Referendum Keanggotaan Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016. Referendum merupakan pemilihan langsung bagi semua pemilik hak suara di Inggris untuk menentukan jawaban dari pertanyaan yang diusulkan. Referendum dilaksanakan untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan mendasar negara, baik

terkait isu konstitusional maupun persoalan mendasar negara lainnya, yang diputuskan dengan melibatkan peran serta rakyat secara menyeluruh.

Referendum dilakukan di 382 distrik di wilayah *England, Wales, Scotland, Northern Ireland*, dan *Gibraltar*. Hasil dari referendum tersebut, sebanyak 51,9% rakyat Inggris memilih Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Sementara sisanya lebih memilih untuk tetap menjadi bagian dari anggota Uni Eropa.

Yang menjadi persoalan adalah paket "*Brexit May*" yakni kesepakatan tentang keluarnya



Inggris dari Uni Eropa, harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Parlemen Inggris. Sementara mayoritas Anggota Parlemen Inggris menolak kesepakatan tersebut. Penolakan ini berasal dari Partai Oposisi, Partai Buruh, dan Partai Konservatif. Partai Konservatif merupakan Partai Perdana Menteri Inggris, Theresa May. Satu-satunya cara untuk mendapatkan persetujuan *Brexit* adalah memenangkan suara mayoritas di parlemen.

Dengan adanya penolakan dari Anggota Parlemen Inggris maka Inggris akan keluar dari Uni Eropa tanpa perjanjian sama sekali (*no deal Brexit*). Oleh karena itu, setelah berpisah dengan Uni Eropa, maka seluruh undang-undang, peraturan, maupun kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara anggota Uni Eropa selama ini, menjadi tidak berlaku lagi bagi Inggris.

Dalam rangka meraih dukungan dari Partai Buruh, Perdana Menteri May berencana untuk mengajukan RUU terkait pengaturan Pabean dengan Uni Eropa. Perdana Menteri May juga telah menawarkan tempat bagi Anggota Parlemen dari Partai Buruh untuk ambil bagian dalam delegasi Inggris ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa di Brussels yang dimulai tanggal 10 April 2019. Pada saat KTT di Brussels, Perdana Menteri May juga akan mengajukan kembali perpanjangan tenggat *Brexit* yang akan berakhir pada tanggal 12 April 2019. Dengan demikian, Inggris berharap Uni Eropa dapat memperpanjang tenggat sampai tanggal 30 Juni 2019, walaupun

itu berarti bahwa Inggris harus mengikuti pemilihan Parlemen Eropa. Permasalahan yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana perkembangan *Brexit*, dampaknya, dan upaya Indonesia untuk mengantisipasi hal tersebut.

### **Perkembangan *Brexit***

Sejak Inggris tergabung ke dalam Uni Eropa, telah banyak manfaat yang diterima oleh Warga Negara Inggris, antara lain: (1) memberikan kebebasan bagi warga negara Inggris untuk tinggal, bekerja, dan pensiun di berbagai negara anggota Uni Eropa lainnya; (2) terciptanya lapangan pekerjaan yang luas bagi warga negara Inggris terkait dengan kerja sama ekspor antara Inggris dan Uni Eropa; (3) tersedianya fasilitas penunjang bagi Warga Negara Inggris yang bepergian ataupun berlibur di berbagai negara Uni Eropa lainnya seperti mendapatkan jaminan kesehatan; (4) mendapatkan perlindungan konsumen belanja di negara Uni Eropa lainnya terkait kualitas dan keamanan produk yang dibeli; (5) adanya koordinasi dan kerja sama dengan negara Uni Eropa lainnya dalam menjaga keamanan masyarakat Uni Eropa dari teroris, pedofil, perdagangan manusia, dan kejahatan *cyber*; dan (6) mendapatkan pengaruh positif dari Uni Eropa pada kegiatan bisnis warga negara Inggris.

Banyaknya manfaat yang diterima oleh Warga Negara Inggris merupakan alasan kuat bagi para pendukung yang menghendaki agar Inggris tetap bersama dengan Uni Eropa, namun sebagian Warga Negara dan Anggota Parlemen Inggris telah memilih agar Inggris

keluar dari Uni Eropa. Warga tersebut meyakini bahwa Inggris telah banyak mengalami kerugian karena harus memberikan subsidi kepada negara-negara kecil lainnya yang juga merupakan anggota Uni Eropa, padahal Inggris merupakan negara dengan tingkat perekonomian ke-5 terbesar di dunia.

Kesepakatan *Brexit* yang telah ditandatangani Inggris dan Uni Eropa pada November 2018 memperoleh penolakan dari parlemen pada Januari 2019 dengan suara 432 berbanding 202. Pada tanggal 12 Maret 2019, meskipun kesepakatan tersebut telah direvisi, namun parlemen masih menolak dengan suara 391 berbanding 242. Oleh karena itu, Perdana Menteri May berencana untuk melakukan voting ketiga pada April 2019.

Walaupun demikian, dukungan parlemen sepertinya tidak akan berubah. Pilihan yang tersedia dalam proses *Brexit* masih tidak berubah, yakni pertama, Inggris keluar tanpa kesepakatan; kedua, mendukung kesepakatan *Brexit May*; ketiga, memperpanjang tenggat lebih lama (untuk Pemilu ataupun referendum); dan keempat, membatalkan *Brexit*. Kesepakatan yang akan divoting oleh Parlemen Inggris merupakan kesepakatan Inggris-Uni Eropa yang menetapkan ketentuan mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Namun, parlemen tidak akan memvoting Deklarasi Politik yang akan mengatur masa depan hubungan perdagangan Inggris dan Uni Eropa.

Dengan mengabaikan Deklarasi Politik tersebut, maka akan membuat Inggris kehilangan arah dan tidak tahu akan pergi ke mana, dan sekarang Perdana Menteri May

juga mengatakan mundur sehingga hubungan masa depan dengan Uni Eropa akan ditentukan berdasarkan perebutan kekuasaan di Partai Konservatif. Jika mayoritas anggota parlemen mendukung kesepakatan *Brexit* maka tenggat *Brexit* akan diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 untuk disinkronkan dengan aturan Uni Eropa dan Inggris. Meskipun demikian, jika parlemen menolak untuk ketiga kalinya maka tenggat *Brexit* akan diperpanjang hanya sampai tanggal 12 April 2019 dan Inggris harus menentukan keputusan yang hendak dipilihnya.

### **Dampak *Brexit***

Setelah referendum tanggal 23 Juni 2016 diumumkan, keesokan harinya pasar keuangan global mengalami penurunan indeks saham gabungan di hampir seluruh negara. Selain itu, terjadi pelemahan nilai tukar mata uang euro dan poundsterling terhadap dollar AS. Pada tanggal 24 Juni 2016, poundsterling mengalami pelemahan sebesar 8,82% sedangkan euro mengalami pelemahan sebesar 2,7% (Bappenas, 2016).

Salah satu simulasi yang dibuat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tanggal 28 Juni 2016 menunjukkan bahwa *Brexit* yang disertai dengan penurunan ekonomi Eropa mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,1 basis poin. Hal ini berarti *Brexit* memang memberikan dampak penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,001%.

Meskipun demikian, yang perlu diwaspadai adalah penurunan jumlah investasi Inggris ke Indonesia selama 2 tahun terakhir yang nilainya

cukup signifikan. Pada tahun 2018, jumlah investasi Inggris ke Indonesia turun, mencapai 235 juta dollar AS, padahal pada tahun 2017, jumlah investasi Inggris masih mencapai 584 juta dollar AS (Ali Rama, 2019).

Dampak lain *Brexit* terhadap Indonesia adalah menurunnya nilai perdagangan Bilateral Indonesia dan Inggris. Nilai perdagangan kedua negara mengalami penurunan sebesar 1,2% pada tahun 2017, yakni turun menjadi sebesar 2,48 miliar dollar AS dari tahun 2016. Dari nilai perdagangan tersebut juga diketahui bahwa nilai impor Indonesia dari Inggris juga mengalami penurunan sekitar 0,64% dari keseluruhan impor pada tahun 2017 (Ali Rama, 2019). Inggris merupakan mitra dagang keempat terbesar Indonesia di antara negara-negara Eropa setelah Jerman, Belanda, dan Italia. Salah satu komoditi unggulan Indonesia yang diekspor ke Inggris adalah produk hasil olahan kayu.

### Upaya Antisipasi Indonesia

Sebagai langkah antisipasi *Brexit*, Indonesia telah mereplikasi -Perjanjian Kemitraan Sukarela-Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan Bidang Kehutanan (*Forest Law Enforcement, Governance, and Trade and Voluntary Partnership Agreement/FLEGT-VPA*) yang selama ini sudah berlaku di Uni Eropa agar disepakati secara bilateral dengan Inggris. Selama ini, Indonesia baru memiliki Perjanjian FLEGT-VPA dengan Uni Eropa.

FLEGT-VLA merupakan lisensi yang mengatur tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Bidang Kehutanan dari Uni Eropa. Perjanjian ini bersifat mengikat dalam

perdagangan internasional antara negara-negara Uni Eropa dengan negara-negara penghasil kayu di luar Uni Eropa. Tujuan dari perjanjian ini untuk meyakinkan para pembeli agar produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa berasal dari sumber legal. Indonesia merupakan negara pertama yang meraih lisensi FLEGT-VPA ini.

Format FLEGT-VPA dengan Inggris merupakan replikasi FLEGT-VPA dengan Uni Eropa yang ditandatangani pada tahun 2013. Perjanjian ini merupakan komitmen Indonesia terhadap Uni Eropa terkait pelestarian lingkungan hidup dengan menyediakan kayu dan produk kayu berkelanjutan. Penandatanganan Kemitraan Sukarela-Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan Bidang Kehutanan antara Indonesia dan Inggris dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Duta Besar Inggris Moazzam Malik di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019.

Untuk mengantisipasi *Brexit*, Pemerintah telah mengkaji ulang kesepakatan atau kerja sama perdagangan lainnya. Namun, Pemerintah lebih memprioritaskan FLEGT karena nilai perdagangannya sangat signifikan. Kayu Indonesia yang masuk ke Inggris mencapai seperempat dari total kayu Indonesia yang masuk ke Uni Eropa dengan nilai ekspor sebesar 250 juta dollar AS (Kompas, 29 Maret 2019). Dengan adanya Perjanjian ini, diharapkan tidak ada hambatan dalam perdagangan kayu dan produk kayu berkelanjutan antara Indonesia dan Inggris seperti yang berjalan selama ini.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) milik Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari

Inggris. SVLK telah dibangun oleh Indonesia sejak tahun 2003. Oleh karena itu, kayu-kayu asal hutan Indonesia yang bersifat legal akan memperoleh kemudahan masuk ke Inggris. Langkah antisipasi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan, dan memperkuat daya saing komoditas Indonesia, sehingga komoditas Indonesia bisa lebih kompetitif bila dibandingkan dengan komoditas dari negara lainnya.

### Penutup

*Brexit* dengan segala perkembangannya harus diantisipasi oleh Indonesia. Meskipun sudah terdapat langkah antisipasi yang dilakukan Pemerintah terhadap produk ekspor olahan kayu, namun Indonesia juga harus kembali mengkaji kesepakatan atau perjanjian kerja sama terhadap produk ekspor lainnya. Kesepakatan tersebut perlu dikaji karena berpotensi menaikkan perdagangan nonmigas Indonesia dan Inggris yang relatif menurun secara signifikan dalam 2 tahun terakhir.

Terkait isu *Brexit* dan upaya antisipasi Indonesia, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap komoditas produk unggulan Indonesia lainnya yang diekspor ke Inggris. Selain itu, DPR RI juga dapat meminta Pemerintah untuk mengajak pihak swasta untuk turut mendukung peningkatan ekspor nonmigas Indonesia ke Inggris.

### Referensi

Ali Rama, "Memahami No-Deal *Brexit* dan Dampaknya bagi RI", <https://>

[www.researchgate.net/publication/329558338\\_Memahami\\_No-Deal\\_Brexit\\_Dampaknya\\_bagi\\_RI](http://www.researchgate.net/publication/329558338_Memahami_No-Deal_Brexit_Dampaknya_bagi_RI) diakses 2 April 2019.

"*Brexit* Tidak Pengaruhi Ekspor Kayu Indonesia", *Media Indonesia*, 1 April 2019, hal. 16.

Editor Troitino, David Ramiro, Tanel Kerikmae, Archil Chochia. (2018). "*Brexit*". Switzerland: Springer.

Bappenas (2016), "*Brexit* dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Global dan Indonesia", Kedeputan Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, [https://www.bappenas.go.id/files/6114/6736/0666/BREXIT\\_DAN\\_PENGARUHNYA\\_TERHADAP\\_PEREKONOMIAN\\_GLOBAL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/6114/6736/0666/BREXIT_DAN_PENGARUHNYA_TERHADAP_PEREKONOMIAN_GLOBAL.pdf) diakses 2 April 2019.

"Gelombang Protes Melawan Kepemimpinan PM Theresa May", *Media Indonesia*, 25 Maret 2019, hal. 20.

"Inggris Hadapi Krisis *Brexit* Baru", *Republika*, 31 Maret 2019, hal. 2.

"May Ditekan Pilih Opsi Tanpa Kesepakatan", *Kompas*, 1 April 2019, hal. 5.

"May Kehilangan Kontrol", *Kompas*, 28 Maret 2019, hal. 6.

"Parlemen Ambil Alih Kontrol *Brexit*", *Kompas*, 27 Maret 2019, hal. 5.

"Parlemen Inggris Gelar Voting Ketiga *Brexit*", *Suara Pembaruan*, 29 Maret 2019, hal. 15.

"Parlemen Memvoting *Brexit* Ketiga Kalinya", *Kompas*, 30 Maret 2019, hal. 8.

"PM Inggris Ajukan Kesepakatan Brexit", *Media Indonesia*, 31 Maret 2019, hal. 4.

"Rakyat Inggris Ingin Pemimpin Kuat", *Kompas*, 9 April 2019, hal. 5.

"RI-Inggris Pertahankan Perdagangan Kayu", *Kompas*, 29 Maret 2019, hal. 8.

"Suara Oposisi Dapat Mengamankan Brexit", *Media Indonesia*, 8 April 2019, hal. 21.

"Voluntary Partnership Agreement", <http://www.euflegt.efi.int/vpa> diakses 2 April 2019.

Wihana Kirana Jaya, "Menimbang Perlunya Kebijakan Khusus Pasca Brexit", *Media Keuangan*, Volume XI/No.107/Agustus 201. Hal. 22 <https://www.kemenkeu.go.id/media/4980/media-keuangan-agustus-upload-rev.pdf> diakses 9 April 2019.



Lisbet  
[lisbet.sihombing@dpr.go.id](mailto:lisbet.sihombing@dpr.go.id)

Lisbet, SIP., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Universitas Nasional pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia" (2014), "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" (2015), dan "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" (2017).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.